

## ISU PENTING DI KTT G-20 DAN PERAN RI DALAM PENGUATAN MULTILATERALISME

7

Lisbet

### Abstrak

*KTT G-20 tahun ini merupakan KTT ke-10 dan diselenggarakan di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 30 November 2018-1 Desember 2018. Pada KTT ini, ada banyak hal yang menjadi pembahasan para kepala negara. Meskipun demikian, tulisan ini hanya akan menganalisa mengenai isu perang dagang Amerika Serikat dan China serta kasus pembunuhan wartawan senior The Washington Post Jamal Khasoggi yang menjadi perhatian khusus para kepala negara pada saat KTT G-20. Selain itu, tulisan ini juga membahas bagaimana peran Indonesia dalam memperkuat multilateralisme pada KTT tersebut. Indonesia telah berperan aktif untuk mengingatkan anggota G-20 lainnya agar menekankan pentingnya penguatan kerja sama multilateralisme. Penguatan multilateralisme sangat penting terutama dalam mengatasi persoalan bilateral di antara negara-negara anggota G-20 itu sendiri.*

### Pendahuluan

G-20 merupakan organisasi multilateral yang diawali pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari beberapa negara maju pada tahun 1999 di mana tingkat perekonomian negara-negara tersebut sudah mewakili 85 persen produk domestik global. Pada tahun 2008, G-20 telah meningkatkan levelnya dari pertemuan Menteri Keuangan menjadi pertemuan Kepala Negara.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 tahun 2018 diadakan di Buenos Aires, Argentina pada

tanggal 30 November 2018-1 Desember 2018 dan dihadiri oleh 19 kepala negara, unsur pimpinan Uni Eropa, sejumlah kepala negara undangan, dan unsur pimpinan lembaga internasional. Tema KTT G-20 tahun ini adalah membangun konsensus pada keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Pada pengumuman resmi (komunike) dari KTT ini, sebagian besar anggota G-20 telah menyepakati penerapan *Paris Agreement* 'yang tidak dapat diubah' mengenai isu *climate change*. Kendati demikian, terdapat sebuah paragraf yang menegaskan kembali



keputusan AS menarik diri dari *Paris Agreement*.

Adapun beberapa hasil Deklarasi KTT G-20 yang telah disepakati bersama, antara lain *pertama*, mengenai perdagangan. Seluruh anggota G-20 meminta agar perdagangan bebas dapat dilakukan secara adil. *Kedua*, kesepakatan bersama terkait dengan isu *climate change*. Setiap negara harus meneruskan komitmen mereka untuk mendorong energi terbarukan. *Ketiga*, perubahan teknologi.

KTT G-20 tahun ini merupakan konferensi pertama sejak AS memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap produk ekspor China senilai US\$250 miliar. Selain membahas tentang isu ekonomi, pada KTT tahun ini para kepala negara tersebut juga membahas isu politik. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisa beberapa isu penting yang menjadi perhatian pada saat KTT G-20, dan bagaimana peran Indonesia dalam memperkuat multilateralisme pada KTT tersebut?

## Perang Dagang AS dan China

Tujuan utama China di KTT G-20 ini adalah untuk membuat AS agar dapat menahan dirinya terhadap aksi menaikkan tarif impor pada Januari 2019. China memandang penting pertemuan dengan AS di KTT ini karena perang dagang kedua negara ini telah berdampak pada industri manufaktur China. Indeks kesehatan sektor manufaktur dan jasa (PMI) menurun pada November 2018 menjadi 50. Padahal pada Oktober 2018, PMI China masih mencapai 50,2. Untuk pertama kalinya pertumbuhan manufaktur China mengalami stagnan dalam dua tahun terakhir.

Data manufaktur China ini juga berdampak pada turunnya indeks bursa London, FTSE menjadi 0,8 persen pada 30 November 2018. Penurunan ini dipicu oleh menurunnya saham sektor-sektor pertambangan. Para investor merasa khawatir apabila data manufaktur tersebut dapat berdampak terhadap penurunan permintaan mineral oleh China terkait logam.

Selain berdampak pada bursa Inggris, data manufaktur ini juga berdampak pada penurunan indeks DAX di Jerman karena pengaruhnya terhadap saham-saham otomotif. China merupakan salah satu importir otomotif terbesar Jerman, dan dengan adanya penurunan kinerja ekonominya maka akan berdampak pula pada kemampuan penduduknya dalam membeli kendaraan.

Dengan adanya desakan dari semua kepala negara termasuk Indonesia, akhirnya AS dan China bersepakat untuk menunda pemberlakuan tarif baru atas barang impor asal China dari sebesar 10 persen menjadi 25 persen mulai tanggal 1 Januari 2019. Meskipun, sudah ada beberapa komoditas asal China senilai US\$50 miliar yang telah dikenakan tarif sebesar 25 persen sementara komoditas yang bernilai US\$200 miliar akan tetap berlaku tarif sebesar 10 persen.

Pada pidato pembukaannya, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa AS dan China akan sampai pada sesuatu yang baik bagi AS ataupun China. Sementara Presiden China Xi Jinping menyampaikan bahwa hanya melalui kerja sama kedua negara tersebut yang merupakan dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, maka akan dapat memberikan

kontribusi pada perdamaian serta kesejahteraan dunia.

Sebagai dampak dari kesepakatan ini, China menyatakan kesediaannya untuk membeli produk AS dalam nilai yang besar guna mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap China. Adapun produk AS yang akan dibeli China seperti pertanian, energi, industri dan produk lainnya. Selain itu, selama 90 hari ke depan, AS dan China juga akan terus bernegosiasi membahas perselisihan perdagangan antar kedua negara, terutama berkaitan dengan transfer teknologi dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang menjadi keberatan dari AS, hambatan nontarif dan persoalan siber.

Dengan adanya kesepakatan ini, telah terbuka ruang baru kerja sama yang saling menguntungkan di antara AS dan China. Selain itu, kesepakatan ini telah memberikan dampak positif tidak hanya bagi kedua negara saja melainkan juga bagi negara-negara lainnya seperti Indonesia. Kesepakatan ini juga menguntungkan Indonesia karena Indonesia merupakan *supply chain* produk-produk China, dan AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Dengan demikian, jumlah ekspor Indonesia kepada kedua negara tersebut diharapkan dapat semakin meningkat sehingga juga akan berdampak positif terhadap trend penguatan rupiah.

Munculnya kesepakatan ini juga tidak lepas dari peran penting Presiden Argentina Mauricio Macri. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT G-20, Presiden Macri memiliki peranan penting dalam proses pembahasan isu-isu yang menjadi agenda di KTT

G-20. Presiden Macri pun merasa bertanggungjawab agar KTT ini dapat menghasilkan konsensus. Presiden Mauricio menganggap bahwa dengan koordinasi dan kesepakatan yang telah dicapai di KTT ini adalah sangat baik, apalagi mengingat besarnya tekanan dunia saat ini. Presiden Macri menilai bahwa perdagangan dan investasi internasional merupakan mesin penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Macri mendukung terjadinya reformasi di *World Trade Organisation* (WTO) sehingga WTO dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

### **Kasus Pembunuhan Jamal Khasoggi**

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 2 Oktober 2018, Khasoggi yang merupakan seorang kolumnis di *The Washington Post* telah dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul. Adanya dugaan bahwa pejabat tinggi dari Kerajaan Arab Saudi yang memerintahkan pembunuhan tersebut telah membuat kasus ini lebih mengarah pada aspek politik daripada hukum.

Kasus pembunuhan ini mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari masing-masing kepala negara di KTT G-20. Ada beberapa kepala negara yang bersikap mendukung kehadiran Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS), ada yang mengkritik bahkan memberikan tekanan terhadap kasus Khasoggi. AS merupakan salah satu negara yang bersikap mendukung MBS sejak munculnya kasus ini. Selain AS, MBS juga mendapatkan sambutan hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G-20 ini.

Walaupun sampai saat ini, Pemerintah Arab Saudi telah menahan 11 tersangka, namun masih banyak kepala negara yang mengkritik bahwa upaya Pemerintah Arab Saudi belum maksimal termasuk Indonesia. Dalam pertemuan bilateral antara MBS dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di sela-sela KTT, Wapres Kalla menyinggung MBS tentang kasus tersebut. Selain Indonesia, MBS juga menerima kritik dari Inggris dan Perancis. PM Inggris, Theresa May mengkritik Pemerintah Arab Saudi yang belum menyelesaikan kasus tersebut. PM May menekan agar Arab Saudi dapat memastikan agar semua yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya sehingga hal tersebut tidak terulang kembali. Selain itu, PM May juga menekan MBS agar Arab Saudi tetap mau bekerja sama dengan aparat Turki terkait kasus pembunuhan ini.

Senada dengan Inggris, Presiden Perancis Emmanuel Macron pun memprotes Arab Saudi yang belum berhasil menyelidiki tersangka dari kasus ini. Presiden Macron menekankan pentingnya keterlibatan pakar internasional dalam penyelidikan kasus ini karena penyelidikan terhadap kasus ini harus dilakukan secara tuntas, kredibel dan transparan.

Sikap paling keras berasal dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Pada KTT G-20, Presiden Turki menuntut MBS agar Arab Saudi segera mengekstradisi ke-11 tersangka dalam kasus pembunuhan Khasoggi sehingga dapat menghadapi pengadilan di Turki. Presiden Turki juga menyatakan kekecewaannya kepada negara anggota G-20 lainnya karena

kasus ini tidak menjadi agenda pembahasan dalam perundingan dan hanya Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau saja yang mengangkat mengenai topik itu dalam pembahasan di KTT.

Selama penyelenggaraan KTT, MBS juga telah melakukan pendekatan kepada beberapa kepala negara lainnya seperti Presiden Korea Selatan Moon Jae-In dan Presiden Meksiko Enrique Pena. Dengan kehadirannya dalam KTT ini, MBS hendak menunjukkan bahwa dirinya masih diterima oleh para pemimpin dunia meskipun kasus pembunuhan Khasoggi tetap menjadi sorotan para kepala negara tersebut. Apalagi Arab Saudi masih merupakan salah satu anggota tetap G-20.

Selain itu, dengan adanya dukungan politik yang kuat dari AS dan Rusia yang memiliki pengaruh kuat di G-20, MBS pun merasa posisinya di G-20 masih tetap kuat meskipun kasus pembunuhan tersebut belum tuntas diselesaikan. MBS sendiri merespons sikap kepala negara yang mengkritik dan menekannya tersebut dengan sikap tegas. Pada saat berbicara kepada para pemimpin dunia di KTT, MBS menyatakan bahwa Arab Saudi tidak dapat disalahkan kecuali kejahatannya terbukti.

### **Peran Indonesia**

Pada KTT G-20, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada kesempatan tersebut, Indonesia telah berperan aktif untuk mengingatkan anggota G-20 lainnya agar menekankan pentingnya penguatan kerja sama multilateralisme. Indonesia memandang perlu untuk menjaga stabilitas dunia melalui penguatan kerja sama

multilateral. Indonesia bersama sebagian besar anggota G-20 lainnya menghendaki terciptanya kondisi dunia yang kondusif sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan pembangunan secara menyeluruh.

Selain itu, dalam pidatonya sebagai pembicara utama dengan tema “*Building Concensus*”, Wapres Kalla juga menekankan bahwa G-20 perlu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dunia secara bersama-sama seperti persoalan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Penguatan kerja sama multilateral ini sangat penting terutama dalam mengatasi persoalan di antara negara-negara anggota G-20 itu sendiri. Kerja sama multilateral lebih efektif karena cenderung mengikat satu negara yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan agar setiap anggota G-20 kembali dengan komitmennya agar bersama-sama dapat mewujudkan penguatan kerja sama multilateral ini.

Wapres Kalla juga berharap bahwa hubungan AS dan China ke depan akan berangsur membaik karena apabila tidak, maka tidak hanya akan merusak kedua negara saja melainkan juga ke negara lainnya termasuk Indonesia. Perang dagang antara kedua negara ini membuka peluang bagi semua negara untuk menata kembali sistem perdagangan dunia secara bersama-sama. Menjaga hubungan baik antar negara harus menjadi kepentingan bersama karena saat ini, risiko perekonomian dunia sudah sangat tinggi terlihat dari proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden AS juga menekankan pentingnya asas keadilan dalam kerja sama perdagangan.

Adanya perang dagang AS dan China telah membuat pertemuan-pertemuan yang dibangun dalam jalur multilateral menjadi tidak efektif. Salah satu contoh pertemuan tersebut adalah KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC*). Telah terjadi kegagalan pada KTT yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 November 2018 lalu di Port Moresby, Papua Nugini, karena tidak menghasilkan komunique.

## Penutup

Dari KTT G-20 ini dapat dianalisa bahwa jalur kerja sama multilateral masih tetap efektif untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan bilateral. Setiap pihak tetap harus berupaya untuk tetap menjalin hubungan kerja yang erat meskipun terdapat ketegangan di antara kedua negara yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, setiap negara perlu menggunakan momentum tersebut untuk semakin proaktif mendorong ke arah multilateralisme.

Di berbagai forum internasional, termasuk KTT G-20, Pemerintah Indonesia senantiasa menunjukkan posisinya yang menekankan semangat kemitraan. Indonesia berusaha sangat keras dalam mendorong semangat kerja sama dalam dunia yang sangat kompetitif apalagi sudah terdapat beberapa negara yang menarik dirinya dari komitmen internasionalnya.

Pada setiap kesempatan, Indonesia selalu mendorong semangat kemitraan, sikap saling percaya serta mengedepankan dialog karena Demokrasi harus dihormati dan dilaksanakan pada tatanan dunia. Berdasarkan semangat tersebut, DPR RI juga perlu memberikan dorongan serta dukungan kepada pemerintah agar dapat memperkuat kerja sama multilateral.

## Referensi

- "Ada Desakan Tata Ulang Sistem Perdagangan", *Kompas*, 2 Desember 2018, hal. 1 dan 15.
- "Arab Saudi Manfaatkan KTT", *Kompas*, 3 Desember 2018, hal. 6.
- "AS Tolak Dukung Aksi Global Perubahan Iklim", *Media Indonesia*, 3 Desember 2018, hal. 22.
- "Beijing-Washington Redakan Ketegangan", *Kompas*, 3 Desember 2018, hal. 1 dan 15.
- "Dunia Sambut Positif Kesepakatan Trump-Xi", *Suara Pembaruan*, 3 Desember 2018, hal. 15.
- "Dunia Tunggu Negosiasi AS-China", *Kompas*, 1 Desember 2018, hal. 8.
- "G-20 dan Ancaman Pada Multilateralisme", *Kompas*, 1 Desember 2018, hal. 8.
- "Kekuatan Multilateral", *Kompas*, 3 Desember 2018, hal. 8.
- "MBS, Isu Khasoggi dan Forum KTT G-20", *Kompas*, 2 Desember 2018, hal. 3.
- "Pangeran Bin Salman Galang Dukungan Kawasan", *Kompas*, 3 Desember 2018, hal. 8.
- "Penundaan Tarif Baru AS-Tiongkok Untungkan Indonesia", *Media Indonesia*, hal. 1.
- "Pertemuan Trump-Xi Lebih Menyita Perhatian", *Kompas*, 1 Desember 2018, hal. 8.
- "RI Reiterates Call to Support Multilateralism at G20 Talks", *The Jakarta Post*, 3 Desember 2018, hal. 12.
- "Saudi Didesak Ekstradisi Pembunuh Khashoggi", *Suara Pembaruan*, 3 Desember 2018, hal. 15.



Lisbet  
lisbet.sihombing@dpr.go.id

**Lisbet, SIP., M.Si.**, menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017).

## Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.